

PEMETAAN PERAN DAN FUNGSI KOMPONEN DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

Khaidarmansyah¹⁾, Elsavivia Rusdi²⁾

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jalan Z.A. Pagar Alam No.93 Bandar Lampung
Email: khaidarmansyah@darmajaya.ac.id*

ABSTRACT

Sejalan dengan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis nya telah mencanangkan tema "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dilandasi dengan Semangat Gotong-royong" Komitmen pemerintah ini menunjukkan pembangunan pendidikan harus dilaksanakan dari berbagai aspek, baik dari aspek penyelenggara pendidikan, maupun output dari proses pendidikan itu sendiri. Kota Metro Provinsi Lampung sebagai kota pendidikan juga mempunyai komitmen yang sama dengan pemerintah pusat, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 mengusung pendidikan sebagai tema sentral dalam kebijakan pembangunan daerah. Semangat ekosistem pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi rujukan pula dalam pembangunan pendidikan, namun hal ini belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh komponen pendidikan dalam ekosistem pendidikan Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Kegiatan analisis dilakukan dalam bentuk pengkodean (coding). Terdapat dua prosedur analisis yang merupakan dasar bagi proses pengkodean, yaitu; (a) pembuatan perbandingan secara terus-menerus (the constant comparative method of analysis); dan (b) pengajuan pertanyaan. Populasi penelitian adalah seluruh stakeholder pendidikan, meliputi tenaga didik dan kependidikan, siswa, orangtua, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pemerintah Kota Metro. Hasil penelien menunjukkan bahwa belum semua komponen dalam ekosistem pendidikan di kota Metro memahami peran dan fungsinya masing-masing, baik komponen inti (core component), komponen pemberi (feeding component) maupun komponen pendukung (supporting component). Perlu dibangun kerjasama yang lebih erat lagi antara orang tua, tenaga pendidik dan kependidikan, serta komite sekolah.

Keywords - Komponen Pendidikan, Ekosistem Pendidikan

ABSTRAK

In line with the objective of the establishment of the Republic of Indonesia, namely to educate the nation's life, the Ministry of National Education in its Strategic Plan has launched a theme "The formation of Persons and Ecosystems of Education and Culture that are characterized by the spirit of mutual cooperation". This government commitment shows that education development must be carried out from various aspects, both from the aspect of education providers, and from the education process itself. The Metro City of Lampung Province as a city of education also has the same commitment as the central government, where in the 2016-2021 Medium Term Development Plan carries education as a central theme in regional development policies. The spirit of the educational ecosystem proclaimed by the central government is also a reference in the development of education, but this has not been fully understood by all components of education in the Metro City education ecosystem. This research uses a qualitative method with a grounded theory approach. Analysis activities are carried out in the form of coding. There are two analytical procedures that are the basis for the coding process, namely; (a) making continuous comparisons; and (b) submitting questions. The research population is all education stakeholders, including students and education staff, parents, community organizations engaged in education and the Metro City Government. The results of the research show that not all components in the education ecosystem in Metro city understand their respective roles and functions,

both core components, feeding components, and supporting components. Closer collaboration needs to be established between parents, educators and education staff, and school committees.

Keywords - *Educational Component, Educational Ecosystem*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan di Indonesia, mengingat sumber daya manusia adalah modal utama pembangunan. Sejak dikeluarkannya kebijakan pengalokasian anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan dalam belanja pembangunan, mengindikasikan semakin kuatnya komitmen pemerintah terhadap sektor strategis ini. Selain itu, perubahan kebijakan yang sangat dinamis, juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Semangat pemerintah ini tentunya harus didukung oleh setiap komponen dalam ekosistem pendidikan. Guru sebagai pendidik, serta tenaga kependidikan, siswa, orang tua, serta *stakeholders* pendidikan lainnya, sebagai komponen dalam ekosistem pendidikan, memiliki peran masing-masing yang perlu diperkuat dan dikembangkan.

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019, yang mengusung tema “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dilandasi dengan Semangat Gotong-royong”, membawa pesan bahwa penguatan ekosistem pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas, tidak hanya peserta didik saja, tetapi juga seluruh komponen dalam ekosistem pendidikan yang berujung pada bangsa yang cerdas. Selaras dengan hal tersebut, Kota Metro yang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 telah mencanangkan Visi yaitu “Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera,” juga menempatkan pendidikan menjadi matra pembangunan pada semua sektor. Tidak hanya pendidikan dalam arti formal di sekolah, melainkan juga pendidikan yang bermakna budaya belajar seluruh warganya. Visi pembangunan yang ingin membangun kemajuan di atas kesadaran warga untuk memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Penetapan pendidikan sebagai ruh utama pembangunan dalam waktu dua puluh tahun ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan lima tahun sebagai operasionalisasinya. Dalam dokumen RPJMD, pendidikan tetap menjadi visi, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah pada waktu pemilihan. Hal ini tentunya bukan sebuah kebetulan, karena visi dan misi dalam RPJPD

menjadi acuan calon kepala daerah menyusun visi dan misi serta dituangkan dalam RPJMD Kota Metro.

Ketika kita berbicara tentang sebuah ekosistem, maka kita akan membahas tentang sistem secara utuh, dimana terdapat sub-sub sistem yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Begitu pula halnya dengan ekosistem pendidikan yang terdiri dari banyak komponen. Keterkaitan komponen dalam ekosistem pendidikan selama ini sebenarnya tergambar secara jelas. Namun, kesadaran akan keterkaitan antar komponen dalam ekosistem masih sangat lemah. Pemerintah Kota Metro telah mengusung sektor pendidikan sebagai visi dalam agenda pembangunan daerahnya. Berbagai upaya untuk mewujudkan Kota Pendidikan dilakukan dengan menyingkronkan antara kebijakan pemerintah Kota Metro dengan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat. Meskipun urusan pendidikan menjadi kewenangan daerah, tetapi secara teknis pelaksanaan pendidikan tetap mengikuti secara utuh kebijakan nasional. Pemerintah daerah lebih banyak mengelola pada ranah kebijakan pendukung dan kebijakan teknis.

Penggaungan akan konsep ekosistem pendidikan direspon secara positif oleh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Metro, khususnya Pemerintah Daerah Kota Metro, dengan keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa bertumpu pada satu pihak saja, melainkan menjadi kerja banyak pihak. Dengan demikian ekosistem pendidikan menjadi terminologi yang tepat untuk menggambarkan suatu rangkaian interaksi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil pengambilan data awal di lapangan, konsep ekosistem pendidikan belum dipahami dan belum dikenal oleh stakeholders pendidikan di Kota Metro. Dari 10 orang guru yang menjadi narasumber, hanya 3 orang guru yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik tentang koneksi dan interaksi dalam ekosistem pendidikan. Selebihnya hanya mengetahui konsep ekosistem pendidikan secara umum, sebagian lagi bahkan baru mendengar istilah tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah “Apa yang anda ketahui tentang ekosistem pendidikan?”

Pertanyaan tersebut menjadi pembuka diskusi peneliti dengan objek penelitian yang kemudian berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan. Tiga orang guru yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang ekosistem pendidikan, memberikan

jawaban tentang ekosistem pendidikan sesuai dengan literatur yang ada, peran dan fungsi komponen ekosistem pendidikan, serta memberikan saran atau masukan untuk penguatan peran masing-masing komponen. Sedangkan tujuh orang guru lainnya hanya menyebutkan sampai peran dan fungsi masing-masing komponen saja.

Penelitian awal juga dilakukan terhadap tujuh orang wali murid dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya, seluruh wali murid memberikan jawaban yang hampir sama, dimana tingkat pemahaman mereka hanya sebatas memahami siapa saja dan peran komponen dalam ekosistem pendidikan. Pemangku kepentingan lain adalah pejabat Dinas Pendidikan Kota Metro dengan pertanyaan yang berbeda. Dengan pertimbangan Dinas Pendidikan merupakan subjek yang terdekat dengan informasi kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat, maka pertanyaan yang diajukan adalah “Bagaimana upaya Dinas Pendidikan untuk memperkuat ekosistem pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan RI?” Jawaban yang diberikan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan adalah belum direncanakan secara spesifik kegiatan dalam rangka penguatan ekosistem pendidikan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 ini.

Mendalami satu kasus tentang peran wali murid dan lingkungan sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui wadah Komite Sekolah, misalnya, Dinas Pendidikan belum memiliki program khusus dalam rangka penguatan peran Komite Sekolah di Kota Metro. Akibatnya, mayoritas Komite Sekolah di Kota Metro tidak berfungsi secara ideal. Kondisi tersebut tidak lepas dari masih lemahnya wawasan dan komitmen pemangku kepentingan terhadap pentingnya keterpaduan ekosistem pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan dan program belum lahir dari perspektif ekosistem pendidikan yang baik.

2. TEORI DAN HIPOTESIS

Ekosistem Pendidikan

Literatur yang mengupas secara mendalam tentang ekosistem pendidikan masih sangat terbatas. Kata ekosistem pendidikan mulai menjadi perbincangan sejak ditetapkannya Rencana Strategis Kemendikbud RI tahun 2015-2019 yang mengusung tema “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter yang Dilandasi dengan Semangat Gotong-royong”. Menurut Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ir. Harris Iskandar, Ph.D, saat pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Bogor (5/10/2015), penguatan ekosistem pendidikan dicanangkan sejalan misi Presiden RI Joko Widodo yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam arti bahwa bukan hanya membuat peserta didik pandai dan cerdas, tapi juga membuat kehidupan seluruh warga yang cerdas. Jadi komponen ekosistem secara keseluruhan yang harus dicerdaskan.

Penguatan ekosistem akan dilakukan pada para pelaku pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan juga para pegiat pendidikan lainnya seperti yang aktif dalam berbagai *community development*. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal pemerintahan Jokowi, yaitu Bapak Anis Baswedan, guru adalah tokoh sentral dalam ekosistem pendidikan. Karenanya, guru menjadi fokus utama pembenahan manajemen pendidikan nasional. "Guru adalah kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, terutama melalui perannya dalam proses pendidikan," kata Mendikbud.

Melihat dari asal katanya, ekosistem didefinisikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal-balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada Hipotesis Gaia, yaitu organisme khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada empat kata kunci dalam suatu ekosistem, yaitu :

1. Lingkungan hidup
2. Hubungan timbal balik
3. Aliran energi
4. Tumbuh bersama sama untuk menjaga kestabilan sistem.

Dari keseluruhan literatur, maka ekosistem pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari para pelaku pendidikan, dimana peran dan fungsi para pelaku dalam dunia pendidikan saling mempengaruhi dengan hubungan timbal balik, sehingga terjadi transfer kekuatan untuk menjaga kestabilan sistem pendidikan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan *"whatever governments choose to do or not to do"* segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, yang dikerjakan ataupun yang tidak dikerjakan (Dye,1978). Selanjutnya Dye menyatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan publik, maka harus mengutamakan *goal* (objektifnya) dan merupakan tindakan keseluruhan bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dalam mengimplemetasikan kebijakan publik yang telah dipilih, pemerintah harus melakukan hal-hal yang menyangkut: 1) Organizational seperti pengorganisasian konflik dalam masyarakat; 2) Regulatif berupa pengaturan konflik dalam masyarakat; 3) Diskriminatif melalui pemberian reward kepada masyarakat yang telah melaksanakan atau patuh dengan kebijakan yang dibuat dan pemberian pelayanan material kepada masyarakat seperti pembangunan puskesmas disetiap desa; serta 4) Ekstraktif yaitu pemungutan uang dari masyarakat melalui pajak.

Berbeda dengan pendapat Easton, Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Senada dengan dengan hal tersebut, kebijakan publik menurut James E Anderson (dalam Islamy, 1994) adalah kebijakan – kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah : 1) bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau

mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) bahwa kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Sedangkan menurut Guy Peter (1984) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut terdapat tiga tingkat pengaruh yaitu

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure groups, pada level ini keputusan merupakan sebuah kebijakan terapan;
- b. Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentuan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat;
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat .

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan publik, terdapat beberapa tahap (Dunn,1994) yaitu : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan penilaian kebijakan (*policy assesment*).

Teori Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur/elemen (Easton, 2006). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “immaterial” atau suatu proses “immaterial”, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat “immaterial” penguraian atau penentuan “model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis.

Sementara itu, menurut Easton (1984:395), teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah). Easton juga meringkas ciri-cirinya, sebagai berikut:

1. Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi.
2. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran (seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat).
3. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (input) kedalam beberapa jenis keluaran (output).

Bagian-bagian dalam organisasi merupakan sebuah sistem, berupa individu dan kepribadiannya, struktur formal, pola interaksi informal, pola status dan peranan, lingkungan fisik pekerjaan. Inilah yang disebut sistem organisasi. Konsep sistem fokus pada pengaturan, interaksi, pola komunikasi, serta hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan / keseluruhan.

Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, LAN, 1995, adalah :

1. Suatu sistem selalu terdiri dari atas lebih dari satu bagian (subsistem).
2. Sistem tertentu selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar (Supersystem).
3. Sistem dapat bersifat tertutup atau terbuka.
4. Setiap sistem memiliki batas-batas sistem.
5. Sistem tertutup mempunyai kecenderungan untuk mengalami kemunduran (Entropi)
6. Rasio antara input dan output sistem, perlu untuk mempertahankan berbagai macam keseimbangan sistem itu sendiri demi mempertahankan kelestarian hidupnya. (Keseimbangan Dinamis)
7. Sistem memerlukan "Feed-Back", guna mengendalikan keseimbangan tersebut.
8. Perubahan cepat pada lingkungan sistem, memaksa sistem yang bersangkutan untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan. Perlu pengembangan sarana yang disamping peningkatan mutu juga memerlukan spesialisasi dan differensiasi yang terjadi pada subsistem.
9. Akibat spesialisasi dan differensiasi, struktur sistem itu sendiri harus pula mengalami perubahan. Akibat lain: Batas sistem perlu diperluas.

Komunikasi Sosial

Komunikasi berperan besar dalam sistem sosial masyarakat karena memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan dalam diri individu, kelompok, dan masyarakat secara langsung atau tidak. Pembangunan dalam suatu sistem sosial masyarakat sangat penting, dimana komunikasi menjadi bagian yang vital dalam proses pembangunan menuju perubahan yang lebih baik. Tidak hadirnya komunikasi yang baik diantara para pemangku kepentingan pembangunan dapat berpotensi memicu respon negatif yang tidak diinginkan dan tidak seharusnya.

Komunikasi pembangunan merupakan usaha pemilihan strategi maupun model komunikasi yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan sebagai manfaat pembangunan yang efektif. Komunikasi pembangunan berakar dari teori komunikasi dan teori pembangunan yang bersifat interaktif. Teori komunikasi sebagai jembatan arus

informasi serta media pengembangan ide-ide para pihak mengenai pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai warganya. Sedangkan teori pembangunan dipergunakan untuk mengarahkan perubahan yang hendak dicapai secara terarah sesuai dengan tujuan (Dilla, 2007). Carl I Hovland, Janis, dan Kelley mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak) (Riswandi, 2009). Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lainnya (Riswandi, 2009). Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antarmanusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Terdapat beberapa macam pandangan tentang banyaknya unsur atau elemen yang mendukung terjadinya komunikasi. Aristoteles, ahli filsafat Yunani Kuno dalam bukunya *Rhetorica* menyebut bahwa suatu proses komunikasi cukup didukung oleh tiga unsur yang mendukungnya, yakni siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan dan siapa yang mendengarkan (Cangara 2006:21).

Shannon dan Weaver (1949), dua orang insinyur listrik menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi memerlukan lima unsur yang mendukungnya yaitu pengirim, transmitter, signal, penerima dan tujuan. Awal tahun 1960-an David K. Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana. Formula itu dikenal dengan nama "SMCR", yakni: *Source* (pengirim), *Message* (pesan), *Channel* (saluran-media) dan *Receiver* (penerima). Kemudian Charles Osgood, Gerald Miller dan Melvin L. De Fleur menambahkan lagi unsur efek dan umpan balik (*feedback*). Perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan dari Joseph de Vito, K. Sereno dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam proses komunikasi. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengirim Pesan atau Sumber
2. Pesan
3. Saluran atau Media
4. Penerima Pesan
5. Pengaruh
6. Tanggapan Balik
7. Lingkungan

Adapun fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi (*to inform*)
- b. Mendidik (*to educate*)
- c. Menghibur (*to entertain*)
- d. Mempengaruhi (*to influence*) (Effendy, 2005: 8)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Grounded theory dikemukakan oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss yang menyatakan “*the discovery of theory from data which we call Grounded theory*” atau dengan kata lain, teori harus dibangun beralas (grounded) pada data. Grounded theory merujuk pada teori yang dibangun secara induktif dari suatu kumpulan data. Peneliti langsung terjun ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, teori, dan hipotesis tertentu. Glaser dan Strauss mengetengahkan dua jenis teori, yaitu teori substantive tertentu, atau empiris, dari pengamatan bersifat sosiologis, sedangkan teori formal ditemukan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoritik atau untuk bidang pengamatan sosiologis formal atau konseptual.

Bertolak dari dasar asumsi tersebut, rumusan masalah dalam *grounded theory* disusun secara bertahap. Pada tahap awal—sebelum pengumpulan data, dikemukakan rumusan masalah yang bersifat luas (tetapi tidak terlalu terbuka), yang kemudian nanti—setelah data yang bersifat umum dikumpulkan—rumusan masalahnya semakin dipersempit dan lebih difokuskan sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan. Intinya adalah, bahwa rumusan masalah dalam *grounded theory* disusun lebih dari satu kali. Rumusan masalah yang diajukan pada tahap pertama dimaksudkan sebagai panduan dalam mengumpul

data, sedangkan rumusan masalah yang diajukan pada tahap berikutnya dimaksudkan sebagai panduan untuk menyusun teori. Perumusan masalah yang disebut terakhir ini inheren dengan perumusan hipotesis penelitian.

Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengkodean (*coding*). Pengkodean merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Terdapat dua prosedur analisis yang merupakan dasar bagi proses pengkodean, yaitu; (a) pembuatan perbandingan secara terus-menerus (*the constant comparative methode of analysis*); dan (b) pengajuan pertanyaan. Dalam konteks penelitian *grounded theory*, hal-hal yang diperbandingkan itu cukup beragam, yang intinya berada pada sekitar; (i) relevansi fenomena atau data yang ditemukan dengan permasalahan pokok penelitian, dan (ii) posisi dari setiap fenomena dilihat dari sifat-sifat atau ukurannya dalam suatu tingkatan garis kontinum.

Pada awal penelitian ini telah ditetapkan komponen ekosistem pendidikan berdasarkan interaksi dan keterlibatan komponen dalam dunia pendidikan. Adapun komponen tersebut adalah :

1. Siswa
2. Orangtua
3. Tenaga Didik (Guru)
4. Tenaga Kependidikan (Administrasi, Pengawas)
5. Komite Sekolah
6. Pemerintah (Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)
7. Dewan Pendidikan
8. Swasta yang bergerak di sektor pendidikan

Pengkodean pertama dilakukan setelah dilakukan analisis awal tentang peran dan fungsi masing-masing komponen. Analisis dilakukan dengan melihat data sekunder tentang peran dan fungsi masing-masing komponen. Adapun data sekunder dimaksud adalah penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi tenaga didik dan kependidikan, pemerintah, dan Komite Sekolah. Pengkodean awal terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu komponen inti (*core component*) dan komponen pendukung (*supporting component*). Komponen inti adalah siswa dan stakeholder lain sebagai komponen pendukung. Adapun variabel analisis dari setiap komponen adalah :

1. Peran komponen dalam dunia pendidikan
2. Fungsi komponen dalam dunia pendidikan
3. Interaksi antar komponen dalam dunia pendidikan

Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengkodean (*coding*). Pengkodean merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru. Tujuan pengkodean dalam penelitian Grounded Theory adalah untuk; (a) menyusun teori, (b) memberikan ketepatan proses penelitian, (c) membantu peneliti mengatasi bias dan asumsi yang keliru, dan (d) memberikan landasan, memberikan kepadatan makna, dan mengembangkan kepekaan untuk menghasilkan teori.

Pengkodean pertama dilakukan setelah dilakukan analisa awal tentang peran dan fungsi ismasing-masing komponen. Analisa dilakukan dengan melihat data sekunder tentang peran dan fungsi masing-masing komponen. Adapun data sekunder dimaksud adalah penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi tenaga didik dan kependidikan, pemerintah, dan Komite Sekolah. Pengkodean awal terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu komponen inti (*core component*) dan komponen pendukung (*supporting component*). Komponen inti adalah siswa dan stakeholder lain sebagai komponen pendukung. Adapun variabel analisa dari setiap komponen adalah :

1. Peran komponen dalam dunia pendidikan
2. Fungsi komponen dalam dunia pendidikan
3. Interaksi antar komponen dalam dunia pendidikan

Populasi penelitian adalah seluruh stakeholder pendidikan, meliputi tenaga didik dan kependidikan, siswa, orangtua, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Mengingat pada tahun 2016 telah dilakukan pelimpahan wewenang urusan pendidikan menengah dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi, maka populasi terbatas pada stakeholder pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang implementatif, maka sampel awal penelitian ditentukan sebanyak 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri, 5 (lima) Sekolah Dasar Swasta, 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama

Swasta. Sampel meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orangtua siswa, komite sekolah dan stakeholder pendidikan terkait di sekolah sampel. Sampel akan berkembang sesuai kebutuhan penelitian jika hubungan antar komponen ekosistem belum terlihat secara jelas. Penentuan sampel akan dilihat dari keterlibatan komponen ekosistem dalam dunia pendidikan. Misalnya, tingkat aktivitas komite sekolah, kerjasama sekolah dengan pihak swasta bidang pendidikan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta didik berperan dalam sistem pengawasan

Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka peserta didik berhak dan berkewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran, mematuhi peraturan dan menjaga sarpras pendidikan atau dengan kata lain peserta didik hanya sebatas pada penerima dan pelaksana. Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, peserta didik merupakan komponen yang sangat potensial sebagai pengawas bagi komponen lainnya dalam ekosistem pendidikan. Peserta didik sebagai sasaran utama pembangunan di bidang pendidikan dapat memberikan respon secara alami sebagai *feedback* atas apa yang ia terima. Respon tersebut dapat ia sampaikan secara verbal non formal di sekolah, verbal di rumah, ataupun non verbal di sekolah. Gambarnya adalah sebagai berikut :

- a. *Respon verbal non formal di sekolah.* Kedekatan yang dibangun antara guru dan peserta didik memberikan peluang bagi peserta didik untuk menyampaikan respon secara positif. Berdasarkan hasil observasi di Sekolah Muhammadiyah Metro, kedekatan guru dan peserta didik dapat memberikan masukan bagi guru untuk mengubah pola mengajar. Guru mengetahui cara meningkatkan semangat anak dalam belajar melalui pemberian penghargaan, meskipun hanya sebatas pada pin sederhana bagi mereka yang mendapatkan nilai ujian mingguan terbaik. Strategi ini juga dilakukan untuk menyiasati kurikulum 2013 dimana penilaian tidak menggunakan peringkat dengan pertimbangan bahwa semua anak memiliki potensi yang berbeda-beda.
- b. *Respon verbal di rumah.* Lingkungan rumah merupakan lingkungan yang terdekat dengan kehidupan anak. Hubungan orangtua dan anak yang harmonis sangat membantu anak untuk mengekspresikan dirinya dan lingkungannya. Pada kondisi ini keaktifan orangtua sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi anak di sekolah.

Apakah ia merasa nyaman dengan lingkungan di sekolah, apakah ia merasa kesulitan dalam menerima pelajaran atau mengenai hubungan dengan teman-teman atau gurunya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru wali kelas SD kelas 2 di 2 (dua) sekolah, dijelaskan bahwa anak berprestasi adalah anak-anak yang mendapatkan perhatian penuh dari orangtuanya. Indikatornya adalah mereka yang rajin mengantar dan menjemput anak sekolah, mereka yang ikut membantu anak mengerjakan tugas prakarya di rumah dan mereka yang membangun hubungan berdasarkan nilai-nilai agama.

- c. *Respon non verbal di sekolah.* Mungkin respon inilah yang sering terabaikan oleh kita semua. Peserta didik merupakan pribadi spontan dan alami. Biasanya peserta didik mengekspresikan dirinya melalui tulisan, ucapan, gambar ataupun prestasi. Respon ini biasanya tidak tergambarkan secara jelas oleh kita. Padahal keseluruhan buah pikir dan hatinya tergambarkan dalam keseluruhan produknya dalam bidang pendidikan mengingat kegiatan utama kesehariannya adalah di sekolah. Misalnya, dalam bentuk lukisan, karangan, puisi, ataupun prestasi di sekolah.

Ekosistem Pendidikan

Untuk mendefinisikan konsep ekosistem pendidikan, dilakukan proses pengkodean (*coding*) terlebih dahulu. Pengkodean dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pengkodean komponen dan pengkodean interaksi.

a. Pengkodean Komponen

Pengkodean komponen dilakukan dengan melihat pelaksanaan peran dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil observasi di lapangan. Pengkodean dilakukan berdasarkan peran dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengkodean dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *core component* atau komponen inti, *feeding component* atau komponen pemberi, dan *supporting component* atau komponen pendukung. Berikut disajikan dalam tabel pengkodean komponen.

Tabel 1.
Pengkodean Komponen

NO	Tugas dan Fungsi	Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Observasi
1	Penerima/pemanfaat/pengguna informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan	<i>Core 1(C1)</i>	<i>Core 2 (C2)</i>
2.	Pengajar, pendidik, fasilitator, pencipta lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran, pengambil kebijakan sektor pendidikan	<i>Feeding 1 (F1)</i>	<i>Feeding 2 (F2)</i>
3.	Sebagai pengendali, pengawas, pemberi saran, kritik bagi <i>core</i> dan <i>feeding component</i>	<i>Supporting 1(S1)</i>	<i>Supporting 2 (S2)</i>

Adapun analisis pengkodean sebagai berikut

1. Jika sebuah komponen memenuhi kode 1 dan 2, maka pelaksanaan peran dan fungsi jelas/sesuai antara peraturan sebagai sebuah legalitas dan implementasinya.
2. Jika sebuah komponen hanya memenuhi kode 1, maka komponen tidak melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jika sebuah komponen hanya memenuhi kode 2, maka komponen melaksanakan peran dan fungsi dalam rangka proses adaptasi
4. Jika sebuah komponen memenuhi salah satu kode saja (C, F, atau S), maka komponen melaksanakan peran dan fungsi tunggal.
5. Jika sebuah komponen memenuhi dua atau lebih kode sekaligus, maka komponen melaksanakan peran dan fungsi lain dalam rangka proses adaptasi.

Tabel 2.
Hasil Pengkodean Komponen

NO	Komponen	Kode
1.	Pemerintah Daerah	F1, F2
2.	Lembaga Kursus/Pelatihan	F1, F2, S2
3.	Kelompok Belajar	F1, F2, C1, C2
4.	Tenaga Pendidik	F1, F2, C2
5.	Tenaga Kependidikan	F1, F2, C2, S1, S2
6.	Komite Sekolah	S1, S2
7.	Dewan Pendidikan	S1, S2
8.	Orang tua	F1, F2, S1, S2, C2
9.	Masyarakat	F1, F2, C1, C2, S1, S2
10.	Peserta Didik	C1, S2

Hasil observasi di lapangan yang berbeda dari regulasi terhadap peran dan fungsi komponen dalam ekosistem pendidikan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.
Hasil Observasi

NO	Komponen	Kode
1.	Pemerintah Daerah	F1, F2
2.	Lembaga Kursus/Pelatihan	F1, F2, S2

3.	Kelompok Belajar	F1, F2, C1, C2
4.	Tenaga Pendidik	F1, F2, C2
5.	Tenaga Kependidikan	F1, F2, C2, S1, S2
6.	Komite Sekolah	S1, S2
7.	Dewan Pendidikan	S1, S2
8.	Orang tua	F1, F2, S1, S2, C2
9.	Masyarakat	F1, F2, C1, C2, S1, S2
10.	Peserta Didik	C1, S2

b. Pengkodean Interaksi

Pengkodean komponen dilakukan dengan melihat jenis interaksi yang terjadi antar komponen berdasarkan hasil pengamatan.

Tabel 4.
Pengkodean Interaksi 1

NO	Interaksi	Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Observasi
1	Kerjasama	K1	K2
2.	Akomodasi	Akd 1	Akd 2

Tabel 5.
Pengkodean Interaksi 2

NO	Komponen	Kode
1.	<i>Core Component - Feeding Component</i>	K1, K2
2.	<i>Core Component - Supporting Component</i>	K1, K2

3.	<i>Feeding Component – Supporting Component</i>	Akd 1, Akd 2, K1, K2
----	---	----------------------

Berdasarkan hasil pengkodean dan analisa di atas, maka Ekosistem Pendidikan didefinisikan sebagai *suatu sistem yang terdiri dari para pelaku pendidikan, dimana peran dan fungsi para pelaku saling mempengaruhi dengan hubungan yang bersifat asosiatif, sehingga terjadi transfer kekuatan untuk menjaga kestabilan sistem pendidikan.* Dalam Ekosistem Pendidikan, masing-masing komponen melaksanakan peran dan fungsinya secara terintegrasi dan melakukan proses adaptasi bila terjadi perubahan yang signifikan terhadap sistem yang dapat ditimbulkan oleh satu atau dua komponen untuk menjaga kestabilan sistem agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai dengan maksimal. Proses adaptasi ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen di luar kebutuhan sistem.

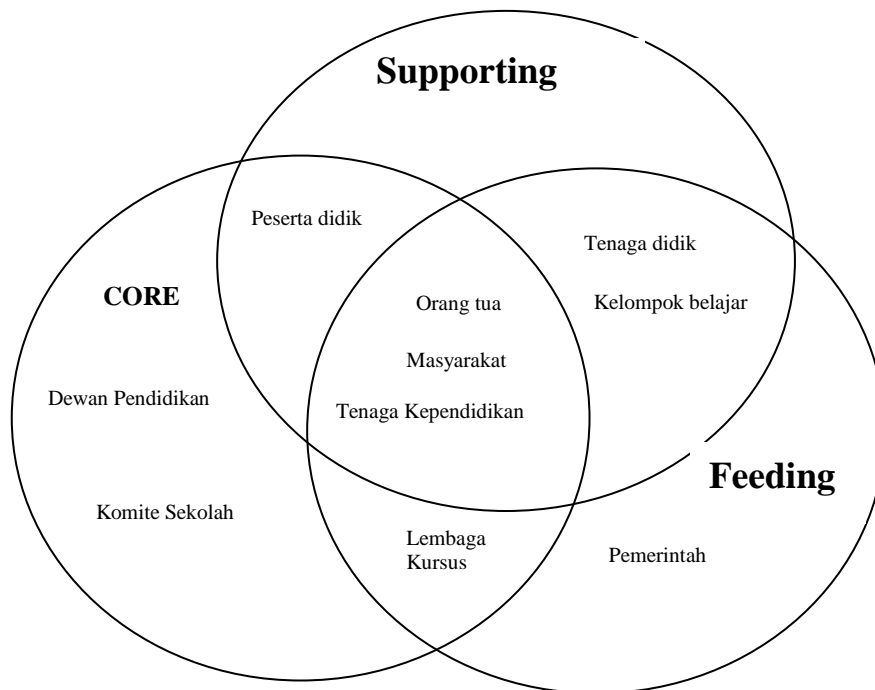
Dari definisi di atas, maka ada 3 (tiga) unsur Ekosistem Pendidikan yaitu :

1. Komponen ekosistem

Komponen ekosistem adalah seluruh stakeholder pendidikan di daerah. Komponen ekosistem pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan peran dan fungsinya dalam ekosistem.

- a. *Core component*/komponen inti. Komponen inti adalah mereka yang berperan sebagai penerima/pemanfaat/pengguna informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan. Yang termasuk dalam komponen inti adalah : peserta didik, tenaga didik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
- b. *Feeding component*/komponen pemberi. Komponen pemberi adalah mereka yang berperan sebagai pengajar, pendidik, fasilitator, pencipta lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran, pengambil kebijakan sektor pendidikan. Yang termasuk dalam komponen pemberi adalah : Pemerintah, tenaga didik, tenaga kependidikan, lembaga kursus, kelompok belajar, orang tua dan masyarakat.

- c. *Supporting component*/komponen pendukung. Komponen pendukung adalah mereka yang berperan sebagai pengendali, pengawas, pemberi saran, kritik bagi *core* dan *feeding component*. Yang termasuk dalam komponen pendukung adalah : Lembaga Kursus, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Orangtua, Masyarakat dan Peserta didik.



Gambar 1.
Peran dan Fungsi Komponen

Dari gambar di atas jelaslah terlihat bahwa ada 3 (tiga) komponen yang memiliki 3 (tiga) fungsi sekaligus, baik sebagai *core component*, *feeding component*, maupun *supporting component*. Ketiga komponen tersebut adalah orangtua, masyarakat dan tenaga pendidik dan kependidikan. Artinya bahwa, ketiga komponen tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan sistem. Berdasarkan hasil wawancara, 70% responden menyatakan bahwa orangtua merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam ekosistem pendidikan. Responden beralasan bahwa sebagian besar waktu peserta didik dihabiskan di rumah. Selain itu faktor kedekatan biologis memberikan tambahan bagi orangtua untuk memahami dan menguasai anak-anaknya melebihi

komponen yang lainnya. Komponen kedua yang memiliki 3 (tiga) fungsi adalah tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil observasi, peran dan fungsi tenaga kependidikan kurang menjadi fokus dalam kebijakan di sektor pendidikan. Padahal tenaga pendidik dan kependidikan memiliki 3 peran sekaligus. Dari gambar di atas juga terlihat fungsi peserta didik yang tidak terbatas pada penerima/pemanfaat/pengguna informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan saja, tetapi juga sebagai *supporting component*. Fungsi ini dilakukan melalui komunikasi yang dibangun antara orangtua dan anak. Artinya, untuk melaksanakan fungsi pengendali, pengawas, pemberi saran, kritik bagi *core* dan *feeding component*, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang nyaman agar anak mau memberikan respon atas kondisi di sekolah.

Hubungan komponen bersifat asosiatif, integratif, dan adaptif

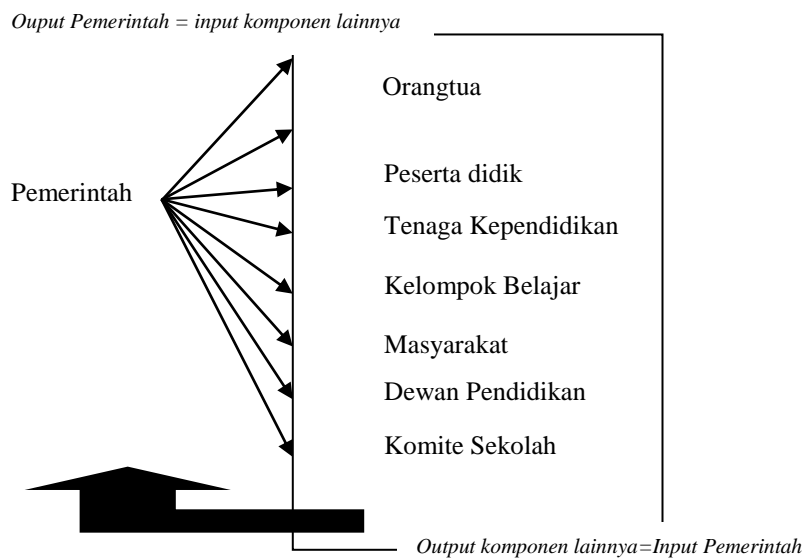
Interaksi komponen dalam ekosistem pendidikan bersifat asosiatif yang artinya interaksi antar komponen mengarah pada pola-pola kerjasama. Dalam ekosistem pendidikan, peneliti membagi 2 (dua) jenis interaksi berdasarkan data primer maupun data sekunder. Adapun tiga jenis interaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Kerjasama.** Kerjasama didorong oleh kesamaan tujuan atau manfaat yang akan diperoleh masing-masing komponen. Kerjasama ini timbul ketika setiap komponen menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mereka mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi kepentingannya melalui kerjasama. Faktor pendorong kerjasama komponen dalam ekosistem pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- b. **Akomodasi.** Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai suatu penyelesaian dari konflik antar komponen. Biasanya upaya akomodasi diawali dengan saling mengurangi sumber konflik agar intensitas pertentangan mereda.

Tabel 6.
Bentuk Interaksi Antar Komponen

NO	Komponen	Kode
1.	<i>Core Component - Feeding Component</i>	Kerjasama
2.	<i>Core Component - Supporting Component</i>	Kerjasama
3.	<i>Feeding Component - Supporting Component</i>	Kerjasama, Akomodasi

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa bentuk interaksi antar komponen bersifat asosiatif, interaksi ini juga bersifat integratif atau dengan kata lain satu sama lainnya saling terkait. Hal ini sejalan dengan sifat sebuah sistem dimana sub sistem saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pelaksanaan peran dan fungsi *core* tidak akan berhasil bila fungsi *feeding* tidak dilakukan dengan optimal. Begitu pula dengan pelaksanaan peran dan fungsi *feeding* tidak akan optimal jika *supporting* component tidak berjalan. Dalam berinteraksi, komponen akan melakukan proses adaptasi bila terjadi perubahan dalam sistem. Perubahan dapat ditimbulkan oleh lingkungan internal sistem maupun eksternal sistem. Perubahan juga dapat ditimbulkan oleh satu atau dua komponen sekaligus. Komponen juga melakukan interaksi secara integratif. Kondisi ini dapat digambarkan melalui pelaksanaan peran dan fungsi yang dimulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan di sektor pendidikan. Output pelaksanaan peran dan fungsi akan diterima sebagai input bagi tenaga didik dan seluruh komponen lainnya. Kemudian, komponen lainnya akan memberikan *feedback* bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan sistem. Bila dilihat dari hubungan ini, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan komponen yang memegang peranan paling penting dalam menjaga kestabilan sistem. Berikut akan disajikan dalam gambar model interaksi tersebut.



Gambar 2.
Model Interaksi Komponen

2. Tujuan sistem adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

Interaksi komponen dalam ekosistem pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini dicapai untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen, dimana kebutuhan tersebut berbeda-beda. Komponen peserta didik membutuhkan pendidikan untuk keberlangsungan hidupnya. Komponen pemerintah membutuhkan keberhasilan pendidikan sebagai penilaian kinerja. Komponen tenaga didik, tenaga kependidikan memerlukan keberhasilan pendidikan sebagai penilaian kinerja dan pengembangan diri. Masyarakat membutuhkan keberhasilan pendidikan untuk memajukan kehidupan, dan sebagainya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ekosistem Pendidikan didefinisikan sebagai *suatu sistem yang terdiri dari para pelaku pendidikan, dimana peran dan fungsi para pelaku saling mempengaruhi dengan hubungan yang bersifat asosiatif, sehingga terjadi transfer kekuatan untuk menjaga kestabilan sistem pendidikan.*

2. Tiga unsur Ekosistem Pendidikan yaitu, komponen ekosistem, hubungan komponen yang bersifat asosiatif, integratif dan adaptif, dan tujuan sistem adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Dalam Ekosistem Pendidikan, masing-masing komponen melaksanakan peran dan fungsinya secara terintegrasi dan melakukan proses adaptasi bila terjadi perubahan yang signifikan terhadap sistem yang dapat ditimbulkan oleh satu atau dua komponen untuk menjaga kestabilan sistem agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai dengan maksimal. Proses adaptasi ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing komponen di luar kebutuhan sistem.
4. Komponen ekosistem adalah seluruh stakeholder pendidikan di daerah. Komponen ekosistem pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan peran dan fungsinya dalam ekosistem.
 - a. *Core component*/komponen inti. Komponen inti adalah mereka yang berperan sebagai penerima/ pemanfaat/pengguna informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan. Yang termasuk dalam komponen inti adalah : peserta didik, tenaga didik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
 - b. *Feeding component*/komponen pemberi. Komponen pemberi adalah mereka yang berperan sebagai pengajar, pendidik, fasilitator, pencipta lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran, pengambil kebijakan sektor pendidikan. Yang termasuk dalam komponen pemberi adalah : Pemerintah, tenaga didik, tenaga kependidikan, lembaga kursus, kelompok belajar, orang tua dan masyarakat.
 - c. *Supporting component*/komponen pendukung. Komponen pendukung adalah mereka yang berperan sebagai pengendali, pengawas, pemberi saran, kritik bagi *core* dan *feeding component*. Yang termasuk dalam komponen pendukung adalah : Lembaga Kursus, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Orangtua, Masyarakat dan Peserta didik.
5. Berdasarkan pelaksanaan peran dan fungsinya, maka komponen yang memiliki 3 (tiga) peran sekaligus adalah komponen orangtua, masyarakat dan tenaga

kependidikan. Kondisi ini menggambarkan pentingnya komponen dalam keberhasilan pencapaian tujuan sistem dan kestabilan sistem.

6. Bila dilihat dari interaksinya, maka komponen pemerintah merupakan komponen yang paling penting dimana ia memberikan input bagi seluruh komponen dan komponen lainnya memberikan feedback bagi pemerintah sebagai input.

Saran

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan kebijakan dengan fokus 3 (tiga) komponen yang memiliki 3 (tiga) peran dan fungsi sekaligus, yaitu komponen orangtua, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
2. Mengintegrasikan seluruh komponen ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan melalui kebijakan, program ataupun kegiatan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Memaksimalkan peran *supporting component* yang dimiliki siswa sebagai komponen potensial dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Berelson, Bernard and Gary A. Steiner, *Human Behavior*. Harcourt, Brace and Word. New York, 1987.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dilla, Sumadi.. *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall 1978.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1984
- Easton, David, *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley, 2006
- Glaser, Barney G and Strauss Anselm L. 1997. *The Discovery Of Grounded Research: Strategies For Qualitative Research*. Chicago: Aldine Pub.Co, 1997
- Guy, Peter B, *American Public Policy*, Chatam House Publihser, New Jersey, 1984
- Hovland, C. I., Janis, I. K. & Kelley, H. H.. *Communication and Persuasion*. New Haven, CT: Yale University. 1953

- Islamy, M.Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo. 2003
- Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, Jakarta, LAN RI, 1995,
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Metro Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
- Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019
- Riswandi, : *Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Graha Ilmu Hardjana, 2009
- Tachjan.. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006
- Winardi, *Pendekatan Sistem dalam bidang Manajemen*. Bandung :Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat, 1995